

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 278 juta jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terutama terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Kota Jakarta menjadi tujuan urbanisasi karena dianggap memiliki banyak peluang kerja dan fasilitas publik. Namun, pertumbuhan penduduk ini tidak diiringi dengan lapangan kerja dan infrastruktur yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan.¹

Kemiskinan menjadi persoalan utama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi karena keterbatasan daya tampung lingkungan dan sumber daya. Jakarta Timur merupakan wilayah administratif dengan jumlah penduduk tertinggi di DKI Jakarta. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), jumlah penduduk Jakarta Timur mencapai 3.254.977 jiwa. Selain itu, jumlah penduduk usia produktif di wilayah ini menempati posisi kedua tertinggi setelah Jakarta Selatan yang mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada tahap usia kerja idel, yang seharusnya menjadi kekuatan dalam mendorong perekonomian dan pengembangan sosial. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan akan pelayanan sosial, termasuk pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 untuk mengatasi kemiskinan struktural. PKH merupakan program perlindungan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Program ini mencakup pemberian bantuan tunai dan pendampingan sosial kepada Keluarga

¹ Arty D W I Januari et al., "Urbanisasi Jakarta Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Dan Lingkungan," *Sustainable Transportation and Urban Mobility* 1, no. 1 (2024): 21–37, <https://journal-iasssf.com/index.php/STUM/article/view/448/471>.

Penerima Manfaat (KPM). Salah satu tujuannya adalah mendorong kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga miskin. Pendampingan sosial menjadi elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut.²

Pelaksanaan pendampingan sosial PKH, terdapat komponen penting bernama *Family Development Session* (FDS). FDS adalah kegiatan edukatif dan pemberdayaan keluarga yang dilakukan secara berkelompok setiap bulan. Materi yang diberikan mencakup lima modul, seperti pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan dan gizi keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, perlindungan anak dan pencegahan kekerasan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama FDS adalah meningkatkan kapasitas KPM agar mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Pendamping sosial memiliki peran penting dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi proses belajar.³

Pendamping sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Pendamping sosial harus memahami kondisi KPM serta mampu menggunakan pendekatan partisipatif dan reflektif.⁴ Dalam pelaksanaan FDS, digunakan prinsip pendidikan orang dewasa atau andragogi. KPM FDS adalah orang dewasa yang pengalaman hidupnya dijadikan dasar dalam pembelajaran. Oleh karena itu, FDS menjadi media penting untuk membentuk kesadaran kritis KPM terhadap kondisinya.⁵

Tabel 1.1 Data KPM Exciting

Kecamatan	Jumlah KPM Exciting
Cakung	2.975
Cipayung	1.740

² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH*, 2021.

³ L. Fitriani, N., Billah, N. D. A., Rahayu, R. D. P., & Purwito, "Pendampingan Program FDS Kepada Keluarga Penerima Bantuan PKH Kota Blitar," *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 116–23.

⁴ N. Triwahyuni, "Studi Pelaksanaan Pelatihan Family Development Session (FDS) Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendamping PKH Di BBPPKS Regional II Bandung.," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 3, no. 1 (2021): 37–46.

⁵ M. Rahmat, R., Trustisari, H., & Esterilita, "Partisipasi Ibu Dalam Kegiatan Family Development Session (FDS) Modul Kesehatan Dan Gizi Anak.," *Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* 1 (2023): 38–51.

Kecamatan	Jumlah KPM Exciting
Ciracas	1.656
Duren Sawit	1.625
Jatinegara	3.599
Kramat Jati	1.478
Makasar	1.447
Matraman	1.881
Pasar Rebo	1.444
Pulo Gadung	1.942
Total	19.787

Sumber: SUDIN Sosial Jakarta Timur

Jumlah KPM yang menerima bantuan melebihi batas ketentuan selama 5 tahun (*exciting*) di Jakarta Timur yang mencapai 19.787 keluarga pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat masih berada dalam program melebihi masa 5 tahun yang ditetapkan dalam Pedoman Umum PKH. Data ini mengindikasikan bahwa tujuan jangka panjang program, yaitu tercapainya kemandirian KPM, belum sepenuhnya terwujud.⁶ Keberhasilan FDS sebagai kegiatan perubahan sosial bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan. Pendamping memiliki posisi penting dalam merubah perubahan perilaku dan sikap hidup keluarga miskin.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping sosial PKH Jakarta Timur, untuk menekan angka KPM yang melebihi batas ketentuan program (*exciting*) diberlakukan praktik kelulusan pengunduran diri, di mana KPM diberhentikan dari program bukan karena telah mencapai indikator kemandirian, melainkan demi memberikan ruang bagi masyarakat miskin lainnya untuk mengikuti program PKH. Kondisi ini menimbulkan jarak yang besar antara tujuan Program PKH dan kenyataan di lapangan. Akibatnya,

⁶ Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan PKH*.

⁷ Fitriani, N., Billah, N. D. A., Rahayu, R. D. P., & Purwito, "Pendampingan Program FDS Kepada Keluarga Penerima Bantuan PKH Kota Blitar."

pelaksanaan program berisiko tidak tepat sasaran dan justru dapat memunculkan masalah kemiskinan baru.

Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan yang jelas. Di satu sisi, program mendorong keluarga untuk segera lulus demi pergantian kuota bantuan. Namun di sisi lain, banyak keluarga penerima manfaat yang sebenarnya belum siap untuk mandiri. Akibatnya, muncul risiko “kemiskinan baru” bagi keluarga yang bantuannya dihentikan padahal belum mandiri. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pelaksanaan FDS selama ini. Jika FDS hanya dijalankan sebagai kegiatan rutin untuk memenuhi kewajiban administrasi, maka tujuan pemberdayaan keluarga tidak akan tercapai.

Praktik kelulusan menggunakan pengunduran diri ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan kondisi lapangan. Di satu sisi, ada tuntutan sistem untuk melakukan pergantian peserta, namun di sisi lain, proses edukasi melalui FDS terindikasi belum mampu mengubah mentalitas dan kapasitas ekonomi KPM secara matang. Kondisi ini menempatkan pendamping sosial pada posisi dilema, pendamping harus memenuhi target administratif kelulusan KPM di tengah tantangan berat memandirikan keluarga miskin di wilayah sepadat Jakarta Timur. Dalam situasi yang penuh dilema antara target administratif dan realita lapangan tersebut, kapasitas internal pendamping dalam mengelola perannya menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau.

Tingginya angka jumlah KPM yang menerima bantuan melebihi batas ketentuan selama 5 tahun (*exciting*) menunjukkan adanya hambatan pemberdayaan. Fenomena ini diikuti dengan munculnya praktik kelulusan melalui perjanjian pengunduran diri di lapangan. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Sumarti (2019) mengenai konsep jebakan ketergantungan. Bantuan sosial tanpa edukasi kuat berisiko menciptakan ketergantungan

permanen bagi keluarga penerima. Hal ini menunjukkan tantangan besar FDS dalam menciptakan kemandirian keluarga miskin.⁸

Riset Haryanti (2020) menyebut jalan pintas administratif berakar dari tekanan struktur organisasi. Masalah ini diperparah dengan kapasitas strategi pemberdayaan yang belum sepenuhnya mumpuni. Hal tersebut mengarahkan perhatian pada kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak program.⁹ Merujuk pemikiran Dewi dan Ratnadi (2021), keberhasilan organisasi ditentukan oleh kekuatan *Human Capital*. Di dalam unsur tersebut terkandung instrumen strategis yang disebut sebagai Modal Intelektual.¹⁰

Penelitian ini juga sejalan dengan teori *human capital* menurut Armstrong dan Taylor, yang menyatakan bahwa modal intelektual merupakan bagian integral dari *human capital*. Modal intelektual mencakup pengetahuan yang dimiliki individu, keterampilan praktis yang digunakan dalam pekerjaan, pengalaman yang dimiliki, serta pemahaman terhadap sistem kerja yang mendukung kinerja individu dalam organisasi. Dalam konteks tersebut, *human capital* tidak hanya mencerminkan seberapa banyak seseorang mengetahui sesuatu, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu diterapkan secara efektif. Pemahaman ini menempatkan modal intelektual sebagai aspek strategis dalam mendorong kinerja dan fungsi sosial.

Secara tugasnya, pendamping memiliki tupoksi mulai dari melaporkan data hingga graduasi. Mengingat keberagaman tugas tersebut, menarik untuk menelaah landasan berpikir para pendamping. Landasan berpikir ini tercermin melalui pemahaman mereka terhadap konsep modal intelektual. Pemetaan dilakukan dengan merujuk pada empat dimensi yang bersinggungan dengan

⁸ Sumarti, T. (2019). *Sosiologi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. T. (2019). *Sosiologi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁹ Haryanti, S. (2020). *Dilema Administrasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. S. (2020). *Dilema Administrasi dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Haryanti, "No Title," n.d.

¹⁰ Ni Putu Krisna Dewi and Ni Made Dwi Ratnadi, "Modal Intelektual Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 8 (2021): 1960, <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p07>.

tupoksi. Dimensi tersebut meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan pemahaman sistem kerja.

Tabel 1 2 Tupoksi Pendamping

Dimensi	Tupoksi
Pengetahuan	Pemahaman metode FDS dan dinamika sosial lokal.
Keterampilan	Pemahaman teknik komunikasi interpersonal dan prinsip andragogi.
Pengalaman	Pemaknaan peran pengalaman dalam menajamkan analisis situasi.
Pemahaman terhadap sistem kerja	Pengenalan kerangka regulasi, standar operasional (SOP), dan tujuan program.

Dimensi pengetahuan dan keterampilan meninjau pemahaman pendamping terhadap metode FDS serta teknik komunikasi andragogi. Sementara itu, dimensi pengalaman bertujuan melihat cara pendamping memaknai hasil FDS sebagai cara untuk bertindak dikemudian hari. Dimensi pemahaman sistem kerja melengkapi konsep ini dengan meninjau pengenalan terhadap tatanan serta peraturan organisasi. Seluruh dimensi tersebut diposisikan sebagai satu kesatuan instrumen pemahaman untuk menggambarkan landasan berpikir pendamping secara objektif.

Tinjauan literatur menunjukkan berbagai sudut pandang dalam melihat kendala program bantuan sosial. Penelitian Sumarti (2019) menemukan bahwa banyak keluarga penerima bantuan yang sulit mandiri karena merasa nyaman dengan bantuan tunai. Sementara itu, Haryanti (2020) melaporkan bahwa waktu kerja pendamping lebih banyak terserap untuk urusan administrasi daripada melakukan edukasi di lapangan. Di sisi lain, Dewi dan Ratnadi (2021) menjelaskan bahwa modal intelektual merupakan elemen penting yang mendukung berjalannya fungsi sebuah organisasi.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perilaku penerima manfaat dan kondisi beban kerja petugas di lapangan. Namun, riset tersebut belum menunjukkan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman para pendamping terhadap konsep modal intelektual yang mereka gunakan saat bekerja. Sebagian besar studi masih berfokus pada hasil evaluasi program atau dampak bantuan terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan hanya untuk memetakan sejauh mana pendamping memahami aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sistem kerja mereka. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai gambaran kognitif pendamping sosial di Jakarta Timur.

Tingkat pemahaman konsep merupakan fondasi utama sebelum seseorang melakukan tindakan nyata di lapangan. Pemahaman ini menentukan bagaimana pendamping dalam menjalankan perannya. Melalui peninjauan tingkat pemahaman konsep, dapat diketahui sejauh mana pendamping memahami perannya sebagai fasilitator FDS. Peninjauan tersebut juga membantu melihat kesiapan pendamping dalam mendukung proses pemberdayaan KPM. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sarana untuk memetakan pemahaman pendamping sosial dalam pelaksanaan FDS.

Dalam penelitian ini, tingkat pemahaman akan diukur menggunakan Taksonomi Bloom pada level kognitif C2 (Memahami). Penggunaan level C2 ini bertujuan untuk melihat kemampuan pendamping dalam menjelaskan kembali dan memaknai pelaksanaan kerja mereka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode survei dengan kuesioner tertutup untuk mendapatkan gambaran yang objektif. Fokus utamanya adalah memetakan pemahaman konsep terhadap empat dimensi modal intelektual yang sudah ditentukan. Tidak ada pengukuran terhadap kinerja nyata pendamping di lapangan karena batasan ini bertujuan agar penelitian tetap konsisten pada lingkup pemetaan pemahaman konsep saja.

Melalui metode survei ini, diharapkan terlihat bagaimana cara pendamping menginternalisasi konsep elemen modal intelektual dalam

perannya. Hasil penelitian diposisikan sebagai basis data deskriptif bagi organisasi yang berguna untuk pengembangan kapasitas pendamping. Penilaian tidak dilakukan terhadap hasil akhir atau *output* program yang sedang berjalan. Dengan berfokus pada level C2 "memahami", penelitian digunakan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan konsep yang dimiliki.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik kelulusan melalui pengunduran diri.

Munculnya fenomena ini sebagai jalan pintas untuk memenuhi rotasi kuota peserta dan target administratif pendamping, meskipun kapasitas ekonomi KPM belum memadai. Praktik ini menciptakan jurang lebar antara kebijakan dan realita di lapangan, di mana pemberhentian bantuan dilakukan bukan karena indikator kemandirian telah tercapai, melainkan demi memberikan ruang bagi calon peserta lain.

2. Tingginya jumlah KPM yang masih menerima bantuan melebihi batas waktu (*exiting*) di Jakarta Timur.

Terdapat 19.787 KPM di Jakarta Timur yang masih menerima bantuan meskipun telah melebihi masa kepesertaan 5 tahun sesuai pedoman program. Data ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan FDS belum sepenuhnya efektif dalam memajukan mentalitas dan kapasitas ekonomi keluarga miskin menjadi mandiri.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tingkat pemahaman pendamping sosial PKH di Jakarta Timur terhadap konsep modal intelektual, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan pemahaman terhadap sistem kerja dalam menunjang pelaksanaan FDS. Penelitian ini tidak membahas secara

langsung hubungan antara tingkat pemahaman tersebut dengan kinerja pendamping sosial atau keberhasilan FDS.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “sejauh mana tingkat pemahaman konsep modal intelektual pendamping sosial PKH dalam menunjang pelaksanaan FDS di Jakarta Timur?”

E. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pendamping sosial PKH di Jakarta Timur terhadap konsep modal intelektual dalam menunjang pelaksanaan FDS.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dalam bidang pendidikan masyarakat, khususnya terkait konsep modal intelektual pada pendamping sosial sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa dan Dosen Prodi Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan diskusi akademik mengenai pentingnya penguasaan konsep modal intelektual dalam proses fasilitasi pembelajaran masyarakat. Hasilnya juga dapat menjadi referensi dalam merancang kurikulum, tugas akhir, maupun proyek pengabdian masyarakat yang relevan dengan isu pemberdayaan dan pendidikan orang dewasa.

b. Bagi Pendamping Sosial PKH

Sebagai bahan refleksi untuk memahami pentingnya peran sebagai pendidik orang dewasa dan meningkatkan kapasitas diri.

- c. Bagi SUDIN Sosial Jakarta Timur & Kementerian Sosial
Memberikan masukan dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas pendamping sosial, baik melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

